BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian maupun metode penelitian yang digunakan maka bab ini akan di paparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian yang akan di jabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variable penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh sesorang atau sekelompok orang yang kegiatannya adalah melakukan produkti dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Terdapat beberapa jenis badan usaha yang diklasifikasikan berdasarkan kegiatan utama yang dijalankannya. Jenis badan usaha tersebut adalah perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri.

1. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa.

   Contoh : Kantor Akuntan, Salon, Bengkel, dan lain-lain.
2. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi.

   Contoh : Toserba, Dealer, Toko Kelontongan dan lain-lain.
3. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi kemudian menjual barang jadi tersebut.

Contoh : Pabrik sepatu, pabrik roti, garment dan lain-lain.

4.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sarana untuk mengkoordinasikan kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dengan melakukan kerja sama antar individu yang ada di perusahaan tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan struktur organisasi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia berbentuk garis dan staf, di mana wewenang dari pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya untuk semua bidang pekerjaan bantuan. Secara garis besar struktur organisasi perusahaan-perusahaan di Indonesia terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

1. Dewan Direksi

a. Direktur Utama

b. Direktur Keuangan

c. Direktur SDM (Sumber Daya Manusia) dan Umum

d. Direktur Pemasaran

e. Direktur Operasi dan Teknik

2. Divisi Pengembangan Bisinis

3. Divisi Sekertaris Perusahaan

4. Divisi Satuan Pengawas Intern

5. Divisi Akuntansi

6. Divisi Keuangan

7. Divisi Sistem dan Teknologi Informasi

8. Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia

9. Divisi Umum

10. Divisi Operasional penjualan

11. Divisi Manajemen Proyek

12. Divisi Operasi

13. Divisi Pengadaan dan Logistik

14. Divisi Produksi dan Purna Jual

15. Divisi Pengembangan Produk

Gambar struktur organisasi perusahaan tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran.

4.1.3 Job Description

Tugas-tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah suatu dewan yang memimpin sebuah usaha korporasi dan menjalankan misi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, dengan kinerja usaha yang menguntungkan, kepuasan pelanggan yang maksimal, serta tingkat pencapaian kinerja usaha dalam setiap tahap perkembangan. Dewan Direksi dapat dibantu oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan.

Tugas pokok Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

A. Menentukan strategi dan kebijakan umum perusahaan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
B. Menjalankan perusahaan sesuai dengan wewenang yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan negara atau pemerintah.

C. Membina dan mengawasi performa unit kerja.

D. Mengintegrasi strategi perusahaan dengan sasaran dan performasi divisi.

Dewan Direksi dipilih dan diangkat oleh pemerintah. Dewan Direksi ini terdiri dari Direktur Utama yang membawahi Direktur Keuangan, Direktur SDM (Sumber Daya Manusia) dan Umum, Direktur Pemasaran, Direktur Operasi dan Teknik.

2. Divisi Pengembangan Bisinis

Pembentukan Divisi Pengembangan Bisnis ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Utama dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang pengembangan bisnis dan regional infocomm centre of excellence (RICE).

3. Divisi Sekertaris Perusahaan

Pembentukan Divisi Sekertaris Perusahaan ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Utama dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Biro Direksi dan Pelaporan Manajemen.

4. Divisi Satuan Pengawas Intern

Pembentukan Divisi Satuan Pengawas Intern ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Utama mengawasi jalannya kegiatan perusahaan meliputi bidang Audit Keuangan, Audit Operasi, serta bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Pengembangan Audit.

5. Divisi Akuntansi

Pembentukan Divisi Akuntansi ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Keuangan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan

perusahaan meliputi bidang Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan, Anggaran & Pelaporan, dan Sistem Akuntansi.

6. Divisi Keuangan

Pembentukan Divisi Keuangan ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Keuangan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Penagihan dan Penerimaan, Strategi Pendanaan, Pendanaan Operasional, Pajak & Asuransi serta Manajemen Aset.

7. Divisi Sistem dan Teknologi Informasi

Pembentukan Divisi Sistem dan Teknologi Informasi ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Keuangan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Sistem Informasi manajemen serta Pengembangan Sistem & Teknologi Informasi.

8. Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia

Pembentukan Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur SDM & Umum dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Pelayanan SDM & Remunerasi, Pengembangan Sistem SDM & Organisasi, Pengembangan SDM dan Penilaian kinerja dan Manajemen Kualitas.

9. Divisi Umum

Pembentukan Divisi Umum ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur SDM & Umum dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Umum & Rumah Tangga, Humas dan CSR/PKBL.

10. Divisi Operasional Penjualan

Pembentukan Divisi Operasional Penjualan ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Pemasaran dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Komersial-System Integrator, komersial Pemeliharaan, Perencanaan & Pengendalian Penjualan serta Pendukung Penjualan.

11. Divisi Manajemen Proyek

Pembentukan Divisi Manajemen Proyek ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Operasi dan Teknik dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Pendukung Manajemen proyek, Perencanaan & Pengendalian Material, Perencanaan & Pengendalian Proyek dan Kualitas Proyek.

12. Divisi Operasi

Pembentukan Divisi Operasi ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Operasi dan Teknik dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Pendukung Operasi, Instalasi, Test & Commissioning, CME serta OSP.

13. Divisi Pengadaan dan Logistik

Pembentukan Divisi Pengadaan dan Logistik ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Operasi dan Teknik dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Perencanaan & Pengendalian Logistik, Pengadaan serta Gudang dan Distribusi.

14. Divisi Produksi dan Purna Jual

Pembentukan Divisi Produksi dan Purna Jual ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Operasi dan Teknik dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Managed Services, Produksi dan Perbaikan, Pelayanan Spare Part, Perencanaan dan Pengendalian Produksi & Purna Jual serta Pendukung Produksi & Purna Jual.

15. Divisi Pengembangan Produk

Pembentukan Divisi Pengembangan Produk ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Operasi dan Teknik dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Pengembangan Produk dan Pendukung Pengembangan Produk.

4.1.3 Aktivitas Perusahaan

Secara garis besar kegiatan usaha perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba. Tetapi disamping laba, perusahan juga harus menjaga agar tetap solvabel, artinya selalu tersedia uang tunai agar perusahaan dapat memenuhi kewajibankewajiban pembayarannya. Kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut adalah :

1. Pemilik menyetorkan modal ke dalam perusahaan.
2. Kreditur memberi pinjaman kepada perusahaan.
3. Perusahaan mengolah uang atau modal menjadi aktiva produktif.
4. Perusahaan menghasilkan barang dan jasa.
5. Penjual menjual barang atau jasa kepada pelanggan.
6. Perusahaan membayar kembali pinjaman bila perusahaan mempunyai
4. kewajiban pembayaran atas pinjaman yang dilakukan.

7. Perusahaan membagi laba kepada pemilik.

Adapun kegiatan perusahaan bila berdasarkan jenis perusahaannya adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Jasa

Secara garis besar, siklus kegiatan perusahaan jasa meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Pembelian

Dalam sebuah perusahaan jasa kegiatan pembelian meliputi pembelian aktiva produktif seperti pembelian bangunan, tanah, dan perlengkapan untuk disewakan, serta aktiva produktif lainnya alam menunjang kegiatan usahanya.

b. Pengeluaran uang atau pembayaran

Pembayaran ini disebabkan oleh adanya pembelian yang sebelumnya telah dilakukan oleh perusahaan. selain itu, pembayaran juga dapat timbul karena adanya keperluan lain misalnya pengembalian pinjaman bila perusahaan memiliki kewajiban pembayaran pinjaman.

c. Penjualan

Penjualan yang diberikan adalah penjualan atas jasa. Penjualan jasa ini dapat berupa penyewaan gedung, penyewaan tanah, penyewaan perlengkapan dan jasa lainnya seperti jasa pemotongan rambut dan lain sebagainya.

d. Penerimaan uang

Penjualan atas jasa akan memberikan pendapatan bagi perusahaan. disamping penjualan, perusahaan akan menerima uang dari sumber-sumber lain, misalnya setoran modal pemilik, pinjaman kreditur, dan sumber lainnya.

2. Perusahaan dagang

Secara garis besar, siklus kegiatan perusahaan dagang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Pembelian

Dalam sebuah perusahaan dagang kegiatan pembelian meliputi pembelian aktiva produktif, pembelian barang dagang dan jasa lain dalam rangka kegiatan usahanya.

b. Pengeluaran uang atau pembayaran

Pembayaran ini disebabkan oleh adanya pembelian yang sebelumnya telah dilakukan oleh perusahaan. selain itu, pembayaran juga dapat timbul karena adanya keperluan lain misalnya pengembalian pinjaman atau membagikan laba kepada pemilik.

c. Penjualan

Penjualan dapat dilakukan secara kredit ataupun tunai. Penjualan secara kredit menimbulkan adanya piutang dagang. Pada saat penjualan, terkadang terdapat barang yang rusak sehingga perusahaan harus menerima pengembalian barang atau memberi potongan harga dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugaian atas pengembalian tersebut.

d. Penerimaan uang

Penjualan atas barang akan memberikan pendapatan bagi perusahaan. disamping penjualan, perusahaan akan menerima uang dari sumber-sumber lain, misalnya setoran modal pemilik, pinjaman kreditur, dan sumber lainnya.

3. Perusahaan Industri atau Manufaktur

Secara garis besar, siklus kegiatan perusahaan industri sama seperti siklus kegiatan perusahaan dagang hanya berbeda pada saat pembelian dan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan perusahaan manufaktur tersebut meliputi sebagai berikut :

a. Pembelian

   Dalam sebuah perusahaan industri kegiatan pembelian meliputi pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong dan jasa lain dalam rangka kegiatan usahanya seperti buruh langsung.

b. Kegiatan Produksi

   Kegiatan produksi yaitu proses pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi kemudian mengolah barang setengah jadi tersebut menjadi barang jadi.

c. Pengeluaran uang atau pembayaran

   Pembayaran ini disebabkan oleh adanya pembelian yang sebelumnya telah dilakukan oleh perusahaan. selain itu, pembayaran juga dapat timbul karena adanya keperluan lain misalnya pengembalian pinjaman atau membagikan laba kepada pemilik.

d. Penjualan

   Penjualan dapat dilakukan secara kredit ataupun tunai. Penjualan secara kredit menimbulkan adanya piutang dagang. Pada saat penjualan, terkadang terdapat barang yang rusak sehingga perusahaan harus menerima pengembalian barang atau memberi potongan harga dan menyebabkan perusahaan mengalamikerugaian atas pengembalian tersebut.

e. Penerimaan uang

Penjualan atas barang akan memberikan pendapatan bagi perusahaan. disamping penjualan, perusahaan akan menerima uang dari sumber-sumber lain, misalnya setoran modal pemilik, pinjaman kreditur, dan sumber lainnya.

4.1.5 Wilayah Penyebaran Perusahaan (Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees)

Berdasarkan cakupan wilayah dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung dengan kode KPP 424, wajib pajak badan (perusahaan) meliputi wilayah :

1. Kecamatan Regol
2. Kecamatan Lengkong
3. Kecamatan Bandungkidul
4. Kecamatan Batununggal
5. Kecamatan Kiaracondong

4.2 Karakteristik Responden

Jumlah keseluruhan kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 54 eksemplar. Jumlah yang kembali dan diolah sebanyak 54 eksemplar. Penyebaran kuesioner penelitian ini ditujukan kepada pemilik perusahaan, ataupun bagian keuangan perusahaan (wajib pajak badan), dan dilakukan dengan cara memberikan kuesioner secara langsung kepada masing-masing pemilik perusahaan setiap wajib pajak badan untuk dijawab.

Dengan adanya keterbatasan penelitian berkaitan dengan peraturan dan kerahasiaan data wajib pajak, berikut disajikan profil responden berdasarkan jenis jenis usaha :

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Data mengenai jenis usaha wajib pajak yang diteliti dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis usaha	Jumlah	(%) Persentase
1.	Dagang	14	25.93%
2.	Jasa	29	53.70%
3.	Manufaktur	11	20.37%
Jumlah		54	100 %

Sumber : Data primer yang telah di olah, 2012

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis udaha tertentu. Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa sebagian besar jenis usaha responden yang jenis perusahaannya dibidang jasa berjumlah 29 atau sebesar 53.70%. Adapun yang lainnya terdapat sebesar 25.93% responden dengan jenis usaha dibidang dagang, dan sebesar 20.37% responden yang jenis usahanya dibidang manufaktur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa . Hal ini disebabkan responden yang jenis perusahaan jasa lebih banyak jumlahnya pada saat pembagian kuesioner pada wajib pajak badan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung.

4.3 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif data hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap dimensi dan variable yang sedang di teliti. Agar lebih mudah dalam menginterprestasikan variable yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terdapat skor tanggapan responden.

4.3.1 Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan *(Financial Reporting)* adalah penyajian dan penyampaian informasi keuangan suatu entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Penyampaian informasi keuangan ini termasuk juga laporan keuangan diluar laporan keuangan resmi salah satunya adalah laporan untuk pajak dalam bentuk Surat pemberitahuan Tahunan (SPT). Kualitas Pelaporan keuangan diukur menggunakan 2 (dua) dimensi, 7 (tujuh) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 18 butir pernyataan. Berikut rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada masing-masing dimensi.

1. Dimensi Proses Pelaporan

Untuk mendapatkan gambaran proses pelaporan secara menyeluruh dalam penelitian ini digunakan 3 indikator yaitu pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran. Hasil penilaian responden untuk masing-masing indikator dimensi proses pelaporan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi Proses Pelaporan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Pencatatan	388	540	71.9%	Baik
2	Penggolongan	382	540	70.7%	Baik
3	Pengikhtisaran	279	540	51.7%	Kurang Baik
Total Dimensi		1049	1620	64.8%	Cukup Baik

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Pada tabel 4.2 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas ketiga indikator yang membentuk dimensi proses pelaporan adalah sebesar 64.8% dan termasuk dalam kategori cukup baik. Data ini memberikan gambaran bahwa proses pelaporan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dalam pelaporan keuangannya sudah cukup baik. Tetapi masih dibawah ideal (skor 100%) dan ditemukan gap 35.2%. Gap ini merupakan hal yang patut diperhatikan untuk meningkatkan proses pelaporan dalam kualitas pelaporan keuangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Agar lebih jelas mengenai proses pelaporan yang di lakukan wajib pajak badan berikut merupakan tanggapan responden pada masing-masing indikator di setiap butir pernyataan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

A. Pencatatan

Indikator pencatanan diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pencatatan

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Pencatatan dilakukan dengan pengecekan bukti transaksi	F	7	24	15	8	0	192	270	71.1%
		%	12.96	44.44	27.78	14.81	0.00			
2	Pencatatan dilakukan tidak rutin	F	12	15	22	5	0	196	270	72.6%
		%	22.22	27.78	40.74	9.26	0.00			
Total Skor								388	540	71.9%

Sumber : Data primer yang telah di olah, 2012

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator pencatatan sebesar 64.4%, dan dikategorikan cukup baik. Data ini memberikan gambaran bahwa pada umumnya responden menilai bahwa proses pencatatan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sudah dilakukan dengan rutin selain itu pencatatan dilakukan dengan adanya pengecekan bukti setiap transaksi yang akan dicatat. Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 44.44% responden dapat dikategorikan baik yang menunjukan pencatatan dengan bukti transaksi sudah dilakukan dengan baik., 12.96% responden dikategorikan sangat baik. Meskipun demikian terdapat pencatatan dengan pengecekan bukti transaksi yang masih kadang-kadang dilakukan sebesar 27.78% responden, dan yg menjawab tidak dilakukan sebesar 41.81% responden. Demikian pula dengan rutinitas pencatatan sebagian besar responden menjawab kadang-kadang yaitu sebesar 40.74% responden dan yang menjawab tidak sebesar 9.26%.

Fenomena variabel ini kemungkinan besar terjadi karena hal ini. Semakin tidak ada pengendalian transaksi maka hasil informasi keuangan tidak akan akurat dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan melalui manipulasi data dapat dimungkin saja terjadi.

B. Penggolongan

Indikator penggolongan diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Penggolongan

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
3	Dilakukannya penggolongan akun	F	10	22	16	6	0	198	270	73.3%
		%	18.52	40.74	29.63	11.11	0			
4	Manfaat data yang telah digolongkan	F	5	22	18	8	1			
		%	9.26	40.74	33.33	14.81	1.85	184	270	68.1%
Total Skor								382	540	70.7%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 70.7% dan dikategorikan baik. Data ini memberikan gambaran bahwa wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sudah melakukan penggolongan akun walaupun masih sederhana, dan terbukti penggolongan yang dilakukan sudah membantu wajib pajak badan untuk melakukan proses pelaporan keuangan menjadi tidak rumit. Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 40.74% responden dapat dikategorikan baik yang menunjukan penggolongan akun sudah dilakukan secara sederhana, 18.52% responden dikategorikan sangat baik, dan pada item pernyataan manfaat penggolongan 40.74% responden dapat dikategorikan baik yang menunjukan bahwa adanya penggolongan sudah membantu dalam proses pelaporan yang dilakukan.

Meskipun demikian terdapat penggolongan yang masih kadang-kadang dilakukan sebesar 29.63% responden, dan yg menjawab tidak dilakukan sebesar 11.6% responden. Demikian pula dengan manfaat penggolongan akun sebagian besar responden menjawab cukup membantu yaitu sebesar 33.33% responden dan yang menjawab tidak sebesar 14.81% bahkan terdapat responden yang menjawat sangat tidak membantu yaitu sebesar 1.85%.

Fenomena variabel ini kemungkinan besar terjadi karena hal ini. Semakin rumit proses yang dilakukan membuat user sulit memahami mengenai dasar informasi keuangan diperoleh yang membuat informasi menjadi tidak jelas.

C. Pengikhtisaran

Indikator pengikhtisaran diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pengikhtisaran

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
5	Pengguna dari hasil pelaporan keuangan	F	5	0	17	32	0	140	270	51.9%
		%	9.26	0	31.48	59.26	0			
6	Kelengkapan laporan	F	5	0	17	31	1	139	270	51.5%
		%	9.26	0	31.48	57.41	1.85			
Total Skor								279	540	51.7%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Persentase total skor tanggapan responden untuk indikator pengikhtisaran sebesar 51.7% dan dikategorikan kurang baik. Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa proses pengikhtisaran laporan keuangan wajib pajak masih belum mampu memenuhi kepentingan perusahaan secara keseluruhan, hal ini disebabkan informasi yang dihasilkan masih belum lengkap. Dari tanggapan responden dapat dijelaskan sebagian besar responden menyatakan bahwa pengguna dari hasil pelaporan keuangan yang hanya kepada pemilik dan bagian keuangan saja yaitu sebesar 59.26%, kemudian kelengkapan laporan sebagian besar responden menyatakan tidak lengkap yaitu sebesar 57.41% responden.

Fenomena yang terjadi pada pelaporan keuangan ini juga kemungkinan besar terjadi karena hal ini. Dengan pembatasan dibuatnya laporan keuangan dan kurang lengkapnya laporan yang dihasilkan membuat hasil informasi keuangan yang dihasilkan menjadi tidak relevan.

2. Kualitas / Karakteristik Kualitatif

Kualitas / Karakteristik Kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Untuk mengukur dimensi Kualitas/Karakteristik Kualitatif dalam penelitian ini digunakan 4 indikator yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. Hasil penilaian responden untuk masing-masing indikator dimensi variabel kualitas pelaporan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi Kualitas/ Karakteristik Kualitatif

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Dapat dipahami	602	810	74.3%	Baik
2	Relevan	412	810	50.9%	Kurang Baik
3	Keandalan	553	1080	51.2%	Kurang Baik
4	Dapat dibandingkan	415	540	76.9%	Baik
Total Dimensi				63.3%	Cukup Baik

Sumber : Data primer yang telah diolah,2012

Pada tabel 4.6 terlihat bahwa persentase untuk dimensi kualitas/karakteristik kualitatif adalah sebesar 63.3% yang dikategorikan cukup baik. Artinya bahwa kualitas/karakteristik kualitatif dalam mengukur kualitas pelaporan keuangan telah dinilai cukup namun masih belum dapat dikatakan ideal (skor 100%) dan ditemukan gap 36.7%. Gap ini merupakan hal yang patut diperhatikan untuk meningkatkan kualitas / karakteristik kualitatif pelaporan keuangan yang dilakukan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Agar lebih jelas menggambarkan dimensi kualitas/karakteristik kualitatif pelaporan keuangan, berikut ini merupakan tanggapan responden pada masing-masing indikator di setiap butir pernyataan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

A. Dapat dipahami

Indikator dapat dipahami diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Dapat Dipahami

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
7	Informasi yang diperoleh dapat dipahami user	F	18	19	16	1	0	216	270	80%
		%	33.33	35.19	29.63	1.85	0			
8	Informasi yang dihasilkan tidak jelas	F	13	26	12	3	0	211	270	78.1%
		%	24.07	48.15	22.22	5.56	0			
9	Laporan yang dihasilkan dapat dimengerti	F	4	20	16	13	1	175	270	64.8%
		%	7.41	37.04	29.63	24.07	1.85			
Total Skor								602	810	74.3%

Sumber : Data primer yang telah di olah, 2012

Secara keseluruhan skor penilaian responden untuk variable dapat dipahami sebesar 73.3% dan dikategorikan baik. Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees penyajian informasi dalam laporan yang dihasilkan sudah jelas dan dapat dipahami pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian persentase skor tanggapan responden 35.19% responden dapat dikategorikan baik yang menunjukan bahwa laporan yang dihasilkan dapat dipahami dengan baik, 33.33% responden menyatakan sangat baik. Selain itu kejelasan informasi yang dihasilkan dinyatakan jelas sebesar 48.15% responden, 24.07% responden sangat jelas. Sama halnya dengan item pernyataan laporan yang dihasilkan dapat dimengerti responden yaitu sebesar 37.04% responden. Meskipun demikian terdapat informasi yang masih sebagian dapat dipahami user yaitu sebesar 29.63% responden dan yang tidak 1.85%, selain itu pada item pernyataan lain 22.22%

Fenomena variabel ini kemungkinan besar terjadi karena hal ini. Semakin tidak dimengertinya informasi keuangan yang dihasilkan membuat data menjadi tidak relevan.

B. Relevan

Indikator relevan diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Relevan

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
10	Informasi akuntasi tidak untuk pengambilan keputusan	F	4	0	15	34	1	134	270	49.6%
		%	7.4`	0	27.78	62.96	1.85			
11	Informasi akuntansi untuk mengevaluasi masa lalu	F	4	0	20	30	0	140	270	51.9%
		%	7.41	0	37.04	57.41%	0			
12	Informasi akuntansi tidak dapat melihat kinerja perusahaan	F	1	5	17	31	0	138	270	51.1%
		%	1.85	9.26	31.48	57.41	0			
Total Skor								412	810	50.9%

Sumber : Data primer yang telah di olah, 2012

Secara keseluruhan persentase skor penilaian responden untuk indikator relevan sebesar 50.9%. Nilai ini berada pada interval kurang baik. Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees menunjukkan informasi yang dihasilkan belum dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang baik, dan masih kurangnya informasi untuk dapat mengevaluasi perusahaan dimasa lalu, maupun kinerja dimasa datang. Kemudian tanggapan responden sebesar 62.96% dikategorikan tidak baik yang menunjukan bahwa informasi akuntansi tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, juga pada item pernyataan lain sebesar 57.41% responden menyatakan tidak dapat mengevaluasi masa lalu, dan pada penyataan

informasi untuk melihat kinerja perusahaan dikategorikan tidak baik yaitu sebesar 57.41%.

Fenomena pelaporan keuangan ini kemungkinan besar terjadi karena hal ini. Dengan tidak adanya manfaat informasi keuangan bagi pengambilan keputusan perusahaan, penilaian kinerja perusahaan dan evaluasi perusahaan dimasa lalu, menunjukan informasi keuangan yang dihasilkan tidak akurat.

C. Keandalan

Indikator keandalan diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Keandalan

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
13	Kesesuaian informasi yang dihasilkan dengan kondisi perusahaan	F	2	3	15	33	1	134	270	49.6%
		%	3.70	5.56	27.78	61.11	1.85			
14	Kejujuran dalam penyampaian informasi yang dihasilkan	F	4	2	15	32	1	138	270	51.1%
		%	7.41	3.70	27.78	59.26	1.85			
15	Bebas dari kesalahan penyajian	F	2	8	13	30	1	142	270	52.6%
		%	3.70	14.81	24.07	55.56	1.85			
16	Kelengkapan informasi yang disajikan	F	2	6	14	31	1	139	270	51.5%
		%	3.70	11.11	25.93	57.41	1.85			
Total Skor								553	1080	51.2%

Sumber : Data primer yang telah di olah, 2012

Persentase skor penilaian responden untuk indikator keandalan sebesar 51.2% dapat dikategorikan kurang baik. Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa ketidaksesuaian informasi dengan kondisi perusahaan, dengan adanya penyajian yang kurang jujur dan dokumen yang tidak lengkap menjadikan informasi dalam laporan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dinilai masih belum dapat diandalkan. Kemudian berdasarkan tanggapan responden 61.11% responden dikategorikan tidak baik yang

menunjukan bahwa informasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan, namun masih terdapat 5.56% yang menyatakan sesuai dan 3,36% responden yang menyatakan sangat sesuai.

Pada item pernyataaan lain 59.26% responden juga dikategorikan tidak baik yang menyatakan bahwa masih adanya ketidak jujuran dalam penyampaian informasi keuangan yang dilakukan, dan hanya 13.70% responden yang menyatakan jujur, dan 7.41 % yang menyatakan sangat jujur. Juga pada item pernyataan lain tanggapan responden sebesar 55.56% responden dikategorikan tidak baik yang menunjukan bahwa masih tidak bebasnya penyajian dari kesalahan material yang dilakukan. Selain itu pada item pernyataan kelengkapan nformasi yang disajikan sebagian besar tanggapan responden dikategorikan tidak baik yaitu sebesar 57.41%.

Sehingga fenomena yang terjadi pada variabel pelaporan keuangan kemungkinan besar dikarenakan hal ini. Dengan semakin rendahnya kualitas data yang dihasilkan maka informasi keuangan menjadi tidak akurat.

D. Dapat Dibandingkan

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Dapat di Pahami

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Total
			5	4	3	2	1			
17	Membandingan laporan dari tahun / perusahaan lain	F	12	26	10	6	0			
		%	22.22	48.15	18.52	11.11	0	206	270	76.3%
18	Kesesuaian dengan aturan pajak dan SAK	F	9	33	8	4	0			
		%	16.67	61.11	14.81	7.41	0	209	270	77.4%
Total Skor								415	540	76.9%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.10 persentase skor penilaian responden untuk indikator dapat dibandingkan sebesar 76.9% dan dapat dikategorikan baik. Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Bandung Karees sudah dapat menyajikan laporan yang dapat dibandingkan kesesuaian informasinya baik dengan laporan masa sebelumnya maupun dengan perusahaan lain. Kemudian berdasarkan tanggapan responden sebesar 48.15% responden dikategorikan baik, yang menunjukan laporan-laporan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan tahun-tahun sebelumnya maupun dengan perusahaan lain. Juga mengenai kesesuaian dengan aturan pajak dan SAK sebesar 61.11% responden dikategorikan baik, yang menunjukan laporan-laporan yang dihasilkan sudah sesuai. Meskipun demikian masih terdapat responden yang menyatakan kadang-kadang dapat dibandingkan yaitu sebesar 18.52% responden, demikian pula dengan kesesuaian aturan dengan pajak dan SAK yang masih terdapat responden yang menyatakan kurang sesuai yaitu sebesar 14.81%.

Fenomena pelaporan keuangan yang terjadi kemungkinan besar dikarenakan hal ini. Semakin tidak sesuainya proses pelaporan keuangan yang dilakukan dengan peraturan terkait, menyebabkan informasi keuangan menjadi tidak relevan.

Secara keseluruhan untuk penilaian terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan yang diteliti dapat diperoleh dari jumlah penilaian terhadap 2 dimensi yang digunakan. Hasil akumulasi skor indikator variabel kualitas pelaporan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Rekapitulasi Tanggapan Responden
Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan

No	Dimensi	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Total	Kriteria
1	Proses Pelaporan	Pencatatan	388	540	71.9%	Baik
2		Penggolongan	382	540	70.7%	Baik
3		Pengikhtisaran	279	540	51.7%	Kurang Baik
4	Kualitas/ karakteristik Kualitatif	Dapat dipahami	602	810	74.3%	Baik
5		Relevan	412	810	50.9%	Kurang Baik
6		Keandalan	553	1080	51.2%	Kurang Baik
7		Dapat dibandingkan	415	540	76.9%	Baik
Total Dimensi			3031	1.620	62.4%	Cukup Baik

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Hasil persentase skor aktual dari kualitas pelaporan keuangan diperoleh sebesar 64,2%. Nilai yang diperoleh masuk dalam kategori cukup baik. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan indikator, sebagian besar indikator dikategorikan baik, walaupun beberapa indikator lainnya seperti proses pengikhtisaran, relevan, dan keandalan dikategorikan kurang baik. Dari data tersebut dapat digambarkan adanya proses pengikhtisaran yang masih kurang lengkap.

Hal ini sesuai dengan fenomena yaitu adanya wajib pajak yang melakukan manipulasi dengan mengurangi beban pajaknya (2012) dan penggunaan faktur pajak fiktif untuk memperoleh restitusi pajak (Dedi Rudaedi, 2011). Hal ini dinilai tidak reliable / tidak dapat di andalkan karena dapat di artikan bahwa dalam hal pengikhtisaran informasi keuangan dilakukan dengan tidak jujur dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga hal ini menjadi kekurangan dalam proses pelaporan keuangan wajib pajak badan di KPP Pratama Karees Bandung dengan pelaporan keuangannya yang masih kurang relevan dan reliable atau dapat diandalkan.

4.3.2 Analisis Deskriptif Variabel Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan / atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pajak diukur menggunakan 2 (dua) dimensi dan 8 (delapan) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 21 butir pernyataan. Untuk menggambarkan variabel pemeriksaan pajak yang dilakukan pada wajib pajak bandan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees selanjutnya akan diuraikan penilaian responden untuk setiap indikator yang diukur berupa persentse skor penilaian. Berikut rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada masing-masing dimensi.

1. Dimensi kualitas auditor

Untuk mendapatkan gambaran kualitas auditor secara menyeluruh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan respon dari masing-masing indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden pada Dimensi Kualitas Auditor

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Integritas	605	810	74.7%	Baik
2	Pendidikan	389	540	72.0%	Baik
3	Pelatihan	277	540	51.3%	Kurang Baik
Total Dimensi		1271	1890	66%	Cukup Baik

Sumber : Data primer yang telah di olah, 2012

Hasil persentase skor aktual dari dimensi kualitas auditor berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 66%. Nilai yang mengandung

pengertian bahwa untuk kualitas auditor dalam proses pemeriksaan pajak yang dilakukan pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sudah cukup baik. Dikatakan cukup namun masih dibawah diideal (100%) dan ditemkan gap sebesar 34%. Gap ini merupakan hal yang patut diperhatikan untuk meningkatkan kualitas auditor dalam pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Sementara itu untuk menggambarkan mengenai kualitas auditor di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees lebih dalam. menggunakan 3 indikator yaitu integritas, pendidikan, dan pelatihan. Berikut gambaran tanggapan responden terhadap masing-masing indikator:

A. Integritas

Indikator integritas diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Integritas

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
19	Sikap Tanggung jawab pemeriksa pajak	F	7	29	11	7	0	198	270	73.3%
		%	12.96	53.70	20.37	12.96	0			
20	Kekonsistenan pemeriksa pajak	F	11	28	9	6	0	206	270	76.3%
		%	20.37	51.85	16.67	11.11	0			
21	Sikap dapat di percayanya pemeriksa pajak	F	10	26	11	7	0	201	270	74.4%
		%	18.52	48.15	20.37	12.96	0			
Total Skor								605	810	74.7%

Sumber : Data primer yang telah di olah, 2012

Secara keseluruhan persentase skor penilaian responden untuk indikator Integritas sebesar 74.7%. Nilai ini berada pada interval baik. Data ini menggambarkan bahwa selama dilakukannya pemeriksaan pajak auditor atau pemeriksa pajak menunjukan sikap konsisten dengan pekerjaan yang dilakukannya, dapat dipercaya dan bertanggungjawab. Selanjutnya berdasarkan

tanggapan responden sebagian besar responden dikategorikan baik yaitu sebesar 53.70% responden yang menunjukan bahwa pemeriksa mempunyai sikap tanggungjawab. Untuk kekonsistenan pemeriksa dinyatakan oleh sebagian besar responden yaitu 51.85% responden dikategorikan baik, dan sikap dapat dipercaya dikategorikan sebagian besar responden baik yaitu sebesar 48.15% responden. Meskipun demikian masih terdapat responden yang menyatakan tanggungjawab pemeriksa kurang yaitu sebesar 20.37% responden dan yang tidak 12.96% responden, kekonsistenan pemeriksa kurang sebesar 16.67% responden juga yang menyatakan tidak 11.11% responden, demikian pula dengan sikap dapat dipercaya yang dinilai kurang sebesar 20.37% responden dan yang menyatakan tidak 12.96%.

Fenomena variabel pemeriksaan pajak ini kemungkinan besar dikarenakan hal ini. Dengan semakin kurangnya tanggungjawab dan kekonsistenan dan dapat dipercayanya pemeriksa, maka menyebabkan rendahnya mutu pemeriksaan pajak.

B. Pendidikan

Indikator pendidikan diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Dapat Pendidikan

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
22	Kompetensi audit yang dimiliki pemeriksa pajak	F	6	27	14	7	0	194	270	71.9%
		%	11.11	50	25.93	12.96	0			
23	Pengetahuan mengenai akuntansi yang dimiliki pemeriksa pajak	F	8	26	11	9	0	195	270	72.2%
		%	14.81	48.15	20.37	16.67	0			
Total Skor								389	540	72.0%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Secara keseluruhan persentase skor penilaian responden untuk indikator pendidikan sebesar 72% dan dapat dikategorikan baik. Artinya tingkat pendidikan yang dimiliki pemeriksa pajak sudah dapat dikatakan baik, melihat kompetensi audit maupun pengetahuan akuntansi yang dimiliki dinilai baik. Kemudian untuk tanggapan responden sebagian besar responden dikategorikan baik, yaitu sebesar 50% menunjukan bahwa kompetensi audit pemeriksa pajak sudah baik, juga mengenai pengetahuan akuntansi dikategorikan baik sebesar 48.15% responden. Meskipun demikian masih terdapat responden yang menyatakan masih kurangnya kompetensi audit yang dimiliki yaitu sebesar 25.93%, demikian pula dengan pengetahuan akuntansi yang masih kurang sebesar 20.37%.

Fenomena variabel pemeriksaan pajak kemungkinan besar dikarenakan hal ini. Jika pengetahuan pemeriksa mengenai akuntasi kurang maka akan hasil pemeriksaan menjadi kurang berkualitas.

C. Pelatihan

Indikator pelatihan diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.15
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pelatihan

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
24	Tingkat kemampuan terlihat dengan sudah terlatih atau tidaknya pemeriksa pajak	F	3	7	10	33	1	140	270	51.9%
		%	5.56	12.96	18.52	61.11	1.85			
25	Pengalaman pemeriksa pajak	F	2	2	19	31	0	137	270	50.7%
		%	3.7	3.7	35.19	57.41	0			
Total Skor								277	540	51.3%

Sumber : Data primer yang telah di olah

Secara keseluruhan persentase skor penilaian responden untuk indikator Pelatihan sebesar 51.3%. Nilai ini berada pada interval kurang baik. Berdasarkan

data tersebut dapat digambarkan pelatihan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees untuk meningkatkan kemampuan pemeriksa pajak dalam mengaudit yang dilakukan dinilai masih kurang dilihat dari kurangnya pengalaman dan kemampuan pemeriksa. Kemudian untuk masing-masing pernyataan, sebagian besar tanggapan responden menunjukan bahwa pemeriksa terlihat tidak terlatih yaitu 61.11% responden, juga mengenai pengalaman pemeriksa sebagian besar responden menyatakan bahwa pemeriksa terlihat tidak berpengalaman.

Fenomena variabel pemeriksaan kemungkinan besar disebabkan hal ini. Dengan kurangnya pelatihan dan jam terbang pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan, maka mutu pemeriksaan menjadi kurang.

2. Dimensi pelaksanaan tahapan pemeriksaan

Untuk mengukur dimensi pelaksanaan tahapan pemeriksaan digunakan 5 indikator yaitu pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern, pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada WP dan sidang penutup. Rekapitulasi jumlah skor tanggapan respon dari masing-masing indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.16
Rekapitulasi Tanggapan Responden pada Dimensi Pelaksanaan Pemeriksaan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Pemeriksaan di tempat WP	396	540	73.3%	Baik
2	Penilaian Sistem Pengendalian Intern	374	540	69.3%	Baik
3	pemeriksaan atas buku, catatan, dan dokumen	406	540	75.2%	Baik

4	pemberitahuan hasil pemeriksaan	272	540	50.4%	Kurang Baik
5	sidang penutup	177	540	51.3%	Kurang Baik
Total Dimensi		1625	2700	63.9%	Cukup Baik

Sumber : Data primer yang telah di olah, 2012

Hasil persentase skor aktual dari dimensi pelaksanaan tahapan pemeriksaan berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 63.9%. nilai ini dapat di kategorikan cukup baik. Yang juga mengandung pengertian bahwa untuk pelaksanaan tahapan pemeriksaan masuk sudah terlaksana dengan cukup baik. Walaupun demikian masih terdapat gap sebesar 32.1% untuk dapat mencapai pengertian ideal (100%) dalam hal pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Gap ini yang merupakan hal yang patut diperhatikan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

Agar lebih jelas, berikut akan diuraikan beberapa tanggapan responden mengenai dimensi pelaksanaan pemeriksaan, dengan menguraikan rekapitulasi dari masing-masing indikator dimensi adalah sebagai berikut :

A. Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak

Indikator Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.17
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator
Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
26	Sikap pemeriksa saat dilakukan pemeriksaan	F	12	27	5	10	0	203	270	75.2%
		%	22.22	50	9.26	18.52	0			
27	Kenyamanan situasi kerja ketika pemeriksaan	F	7	25	14	8	0	193	270	71.5%
		%	12.96	46.30	25.93	14.81	0			
Total Skor								396	540	73.3%

Sumber : Data primer yang telah di olah

Secara keseluruhan persentase skor penilaian responden untuk indikator memeriksa ditempat Wajib Pajak sebesar 73.3%. Nilai ini berada pada interval baik. Sehingga berdasarkan data tersebut dapat digambarkan bahwa pemeriksaan dengan mendatangi tempat wajib pajak dilakukan dengan baik dan sopan dengan tetap membuat suasana perusahaan nyaman walaupun sedang dilakukan pencarian bukti. Selanjutnya berdasarkan tanggapan responden mayoritas responden menyatakan sikap pemeriksa baik yaitu 50% responden, dan kenyamanan perusahaan ketika dilakukannya pemeriksaan dinyatakan reponden sebesar 46.30% responden tetap membuat nyaman. Meskipun demikian masih terdapat responden yang menyatakan sikap pemeriksa kurang baik yaitu 9.26% responden, dan yang tidak 18.52% responden. Demikian pula dengan kenyamanan situasi kerja yang masih terdapat responden menilai kurang sebesar 25.93 dan yang tidak 14.81%.

Fenomena pemeriksaan pajak kemungkinan besar dikarenakan hal ini. Semakin rendahnya sikap pemeriksa ketika dilakukannya pemeriksaan maka auditor integritas pemeriksa dinilai kurang.

B. Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Indikator pemeriksaan atas sistem pengendalian intern diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.18
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator
Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
28	Pemeriksaan mencakup pengendalian intern perusahaan	F	5	29	8	9	3	186	270	68/9%
		%	9.26	53.70	14.81	16.67	5.56			
29	Pemeriksaan terhadap kebijakan perusahaan	F	7	22	15	10	0	188	270	69.6%
		%	12.96	40.74	27.78	18.52	0			
Total Skor								374	540	69.3%

Sumber : Data primer yang telah di olah

Secara keseluruhan persentase skor penilaian responden untuk indikator Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern sebesar 69.3%. Nilai ini berada pada interval baik. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan system pengendalian intern dalam pemeriksaan pajak sudah dilakukan lengkap untuk mendapatkan informasi sebagai bukti pemeriksaan pajak. Selanjutnya berdasarkan tanggapan responden sebagian besar responden menyatakan baik, dengan pemeriksaan yang dilakukan mencakup lengkap dengan pengendalian intern perusahaan yaitu 53.770%, juga terhadap pemeriksaan kebijakan perusahaan dinyatakan dilakukan dengan baik yaitu dengan mayoritas responden 40.74%. Meskipun demikian masih terdapat responden yang menyatakan kurang adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap pengendalian intern perusahaan yaitu 14.81% responden dan yang tidak 16.67% responden. Demikian pula dengan pemeriksaan kebijakan yang masih kurang yaitu sebesar 27.78% responden dan yang tidak 18.52%.

Fenomena pemeriksaan pajak kemungkinan besar dikarenakan hal ini. Semakin rendahnya pemeriksaan yang dilakukan berkaitan dengan system di perusahaan maka informasi yang dihasilkan menjadi tidak sesuai.

C. Pemeriksaan Buku, Catatan, dan Dokumen

Indikator Pemeriksaan Buku, Catatan, dan Dokumen diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.19
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator
Pemeriksaan Buku, Catatan, dan Dokumen

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
30	Kesesuaian pemeriksaan terhadap buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam	F	10	23	15	6	0	199	270	73.7%
		%	18.52	42.59	27.78	11.11	0			
31	Kesesuaian dengan jangka waktu yang ditentukan	F	14	23	11	6	0	207	270	76.7%
		%	25.93	42.59	20.37	11.11	0			
Total Skor								406	540	75.2%

Sumber : Data primer yang telah di olah

Secara keseluruhan persentase skor penilaian responden untuk indikator Pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen sebesar 75.2%. Nilai ini berada pada interval baik. Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa proses pemeriksaan atas buku, catatan, dan dokumen telah dilakukan sesuai dengan tujuan awal pemeriksaan pajak, sesuai juga dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan tanggapan responden sebagian besar responden menyatakan dokumen, buku, atau catatan yang dipinjam adalah sudah sesuai sebesar 42.59% responden, dan juga terhadap kesesuaian jangka waktu peminjaman dinyatakan sudah sesuai dan tepat oleh mayoritas responden yaitu 42.59%. Meskipun demikian, masih terdapat responden yang menyatakan buku, catatan, dokumen yang dipinjam kurang sesui yaitu 27.78%, dan yang tidak 11.11% responden. Demikian halnya dengan kesesuaian jangka waktu yang ditentukan, masih terdapat yang menjawab kurang sesuai yaitu 20.37% responden, dan yang tidak 11.11%.

Fenomena pemeriksaan pajak kemungkinan besar disebabkan hal ini. Semakin rendahnya kesesuaian pencarian bukti pemeriksaan dengan tujuan awal pemeriksaan pajak, maka hasil pemeriksaan pajak menjadi tidak akurat.

D. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada WP

Indikator pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada WP diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.20
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Kepada WP

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
32	Kesesuaian informasi yang diberitahukan	F	3	1	21	29	0	140	270	51.9%
		%	5.56	1.85	38.89	53.70	0			
33	Kesesuaian dengan prosedur	F	1	2	17	34	0	132	270	48.9%
		%	1.85	3.70	31.48	62.96	0			
Total Skor								272	540	50.4%

Sumber : Data primer yang telah di olah

Sehingga secara keseluruhan persentase skor penilaian responden untuk indikator Hasil pemeriksaan kepada WP sebesar 50.4%. Nilai ini berada pada interval kurang baik. Berdasarkan data tersebut dapat digambarkan bahwa hasil pemeriksaan kepada Wajib pajak masih kurang memberikan informasi, dan prosedur pemberitahuan hasil pemeriksaan yang sesuai. Berdasarkan tanggapan responden sebagian besar responden menyatakan informasi yang diberitahuan tidak sesuai yaitu 53.70% dan juga terhadap kesesuaian prosedur dinyatakan oleh sebagian besar responden tidak sesuai yaitu 62.96%

Fenomena pemeriksaan pajak kemungkinan besar dikarenakan hal ini. Semakin rendahnya tanggapan responden mengenai kesesuaian hasil pemeriksaan

maka menyoroti tahapan-tahapan pemeriksaan yang dilakukan apakah sudah baik atau tidak.

E. Sidang Penutup

Indikator sidang penutup diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.21
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator
Sidang Penutup

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
34	Kesesuaian keputusan hasil pemeriksaan	F	4	5	11	34	0	141	270	52.2%
		%	7.41	9.26	20.37	62.96	0			
35	Prosedur sidang penutup	F	1	5	15	33	0	136	270	50.4%
		%	1.85	9.26	27.78	61.11	0			
Total Skor								177	540	51.3%

Sumber : Data primer yang telah di olah

Persentase skor total penilaian responden untuk indikator Sidang penutup sebesar 51.3%. Nilai ini berada pada interval kurang. Sehingga pelaksanaan sidang penutup pemeriksaan pajak masih kurang sesuai dengan prosedur yang rumit dan hasil keputusan yang belum di rasa adil. Berdasarkan tanggapan responden mengenai kesesuaian keputusan hasil pemeriksaan dinyatakan sebagian besar responden menyatakan tidak sesuai yaitu 62.96% responden, juga terhadap prosedur sidang penutup yang dinyatakan rumit yaitu 61.11% responden.

Fenomena pemeriksaan pajak kemungkinan besar dikarenakan hal ini. Semakin rendahnya kualitas keputusan maka prosedur pemeriksaan dinilai tidak efektif.

Secara keseluruhan untuk penilaian terhadap variabel pemeriksaan pajak yang diteliti dapat diperoleh dari jumlah penilaian terhadap 2 dimensi yang

digunakan. Hasil akumulasi skor indikator variabel Pemeriksaan Pajak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.22
Rekapitulasi Tanggapan Responden
Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak

No	Dimensi	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Kualitas Auditor	Integritas	605	810	74.7%	Baik
2		Pendidikan	389	540	72.0%	Baik
3		Pelatihan	277	540	51.3%	Kurang Baik
4	Pelaksanaan Pemeriksaan	Pemeriksaan di tempat WP	396	540	73.3%	Baik
5		Pemeriksaan SPI	374	540	69.3%	Baik
6		Pemeriksaan Buku, Catatan, dan dokumen	406	540	75.2%	Baik
7		Pemberitahuan hasil pemeriksaan	272	540	50.4%	Kurang Baik
8		Sidang penutup	177	540	51.3%	Kurang Baik
Total Dimensi			2896	4590	65.3%	Cukup Baik

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Hasil persentase skor aktual dari pemeriksaan pajak diperoleh sebesar 65.3%. Nilai yang diperoleh masuk dalam kategori cukup baik. Dapat di katakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan dinilai cukup baik. Selanjutnya berdasarkan indikator, pelatihan auditor berada pada kategori kurang dengan persentase sebesar 51.3%, indikator proses pemberitahuan hasil pemeriksaan yang jugadalam kategori kurang yaitu sebesar 50.4%, dan indikator proses sidang penutup dengan persentase sebesar 51.3% yang juga dinilai masih kurang baik.

Data tersebut telah sesuai dengan pernyataan bahwa proses pemeriksaan pajak yang disampaikan pegawai fungsional pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung (2012) dengan kurang rutinnya kegiatan pelatihan manjadikan kurang berkualitasnya pemeriksaan pajak. Selain itu adanya peran aparat pajak yang tidak professional, dan kurangnya kemampuan dan integritas ini ditandai dengan adanya manipulasi pemeriksaan pajak (Melchias

Markus Mekeng, 2011). Manipulasi dengan adanya. Selanjutnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan pajak. Pelanggaran tersebut adalah adanya dugaan penyelewengan dalam restitusi pajak (Sasmito Hadi Negoro, 2011).

4.3.3 Analisis Deskriptif Variabel Penagihan Pajak

Penagihan Pajak yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan dua dimensi yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif, 5 (lima) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 10 butir pernyataan. Berikut rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada masing-masing dimensi :

1. Dimensi penagihan pasif

Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan penagihan pasif secara menyeluruh pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.23
Rekapitulasi Tanggapan Responden pada Dimensi Penagihan Pasif

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Surat Tagihan Pajak	375	540	69.4%	Baik
2	SKPKB	341	540	63.1%	Cukup Baik
3	SKPKBT	373	540	69.1%	Baik
Total Dimensi		1089	1620	67.2%	Baik

Sumber : Data primer yang telah di olah, 2012

Hasil persentase skor aktual dari dimensi penagihan pasif berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 67,2%. Nilai yang mengandung

pengertian bahwa untuk dimensi penagihan pasif masuk dalam kategori cukup baik. Walaupun demikian masih belum ideal (100%) dan ditemukan gap 32.8%. Gap ini merupakan hal yang patut diperhatikan untuk meningkatkan kualitas penagihan pasif dalam penagihan pajak yang dilakukan pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Agar lebih jelas, berikut akan diuraikan beberapa tanggapan responden mengenai dimensi penagihan pasif, dengan menguraikan rekapitulasi dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

A. Surat Tagihan Pajak

Indikator pemberitahuan surat tagihan pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.24
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator
Surat Tagihan Pajak

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
36	Tanggapan mengenai STP	F	6	27	9	12	0	189	270	70%
		%	11.11	50	16.67	22.22	0			
37	Kesesuaian STP	F	3	29	11	11	0	186	270	68.9%
		%	5.56	53.70	20.37	20.37	0			
Total Skor								375	540	69.4

Sumber : Data primer yang telah di olah

Secara keseluruhan persentase skor penilaian responden untuk indikator Surat Tagihan Pajak sebesar 69.4%. Nilai ini berada pada interval baik. Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa penagihan pasif dengan surat teguran yang dilakukan pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sudah tepat dilakukan dan sesuai dengan prosedur penagihan pajak. Selanjutnya berdasarkan pernyataan masing-masing item, sebagian besar responden yaitu 50% dikategorikan baik yang menunjukan wajib pajak menilai

STP yang dikirimkan sudah tepat, juga pada kesesuaian STP yang dikirimkan sebagian besar responden menyatakan sesuai yaitu 53.70%. Meskipun demikian masih terdapat responden yang menanggapi tidak tepat yaitu 22.22% responden Demikian pula dengan kesesuaian STP yang masih tidak sesuai sebesar 20.37% responden.

Fenomena penagihan pajak kemungkinan besar dikarenakan hal ini. Dengan semakin kurangnya tanggapan positif responden mengenai tindakan penagihan pajak yang dilakukan, maka menghambat tindakan penagihan selanjutnya.

B. SKPKB (Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar)

Indikator pemberitahuan SKPKB diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.25
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator SKPKB

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
38	Kesesuaian SKPKB	F	1	20	23	10	0			
		%	1.85	37.04	42.59	18.52	0	174	270	64.4%
39	Tanggapan mengenai SKPKB	F	0	19	21	14	0			
		%	0	35.19	38.89	25.93	0	167	270	61.9%
Total Skor								341	540	63.1%

Sumber : Data primer yang telah di olah

Secara keseluruhan persentase skor penilaian responden untuk indikator SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) sebesar 63.1%. Nilai ini berada pada interval cukup baik. Dari data tersebut dapat digambarkan penagihan pasif dengan SKPKB telah dilaksanakan cukup, dengan kesesuaian prosedur penagihan pajak. Selanjutnya berdasarkan pernyataan masing-masing item, sebagian besar responden yaitu 42.59% dikategorikan kuran yang menunjukan wajib pajak

menilai SKPKB yang dikirimkan beberapa dinilai kurang sesuai, juga pada ketepatan SKPKB yang dikirimkan sebagian besar responden menyatakan kurang tepat yaitu 38.89%.

Fenomena penagihan pajak kemungkinan besar dikarenakan hal ini. Semakin rendahnya tanggapan positif wajib pajak, maka maka informasi tunggakan pajak tidak akurat yang akan menimbulkan celah adanya penyelewengan yang dilakukan para oknum.

C. SKPKBT (Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan)

Indikator pemberitahuan SKPKBT diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.26
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator SKPKBT

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
40	Tanggapan mengenai SKPKBT	F	2	28	17	7	0			
		%	3.70	51.85	31.48	12.96	0	187	270	69.3%
41	Kesesuaian SKPKBT	F	1	31	13	9	0			
		%	1.85	57.41	24.07	16.67	0	186	270	68.9%
Total Skor								373	540	69.1%

Sumber : Data primer yang telah di olah

Secara keseluruhan persentase skor penilaian responden untuk indikator SKPKBT sebesar 69.1%. Nilai ini berada pada interval baik. Hal ini menunjukkan pemberian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan kepada wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak dinilai sudah baik oleh wajib pajak. Kemudian berdasarkan tanggapan responden sebagian besar menyatakan tepat yaitu 51.85%, dan kesesuaian SKPKBT yang dikirimkan dinyatakan 57.41% responden sudah sesuai. Meskipun demikian

masih terdapat responden yang menyatakan kurang tepat yaitu 31.48% responden, demikian pula dengan kesesuaian SKPKBT yang masih kurang yaitu 24.07%.

Fenomena pada penagihan pasif kemungkinan besar dikarenakan hal ini. Semakin rendahnya tanggapan positif wajib pajak, maka maka informasi tunggakan pajak tidak akurat yang akan menimbulkan celah adanya penyelewengan yang dilakukan para oknum.

2. Dimensi Penagihan Aktif

Untuk mengukur dimensi penagihan aktif digunakan 2 (dua) indikator yaitu surat teguran dan surat paksa. Hasil penilaian responden untuk masing-masing indikator dimensi diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.27
Rekapitulasi Tanggapan Responden pada Dimensi Penagihan Aktif

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Surat Teguran	378	540	70.0%	Baik
2	Surat Paksa	350	540	64.8%	Cukup Baik
Total Dimensi		728	1080	67.4%	Cukup Baik

Sumber : Data primer yang telah di olah, 2012

Hasil persentase skor aktual dari dimensi aktif berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 67.4%. dan dikategorikan cukup baik. Sehingga penagihan aktif yang dilakukan kepada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sudah cukup dilaksanakan dengan baik. Walaupun demikian masih terdapat gap 32.6% untuk dapat dikatakan ideal (100%). Dan gap ini merupakan hal yang patut diperhatikan untuk dapat meningkatkan kualitas penagihan aktif dalam prosedur penagihan pajak wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

A. Surat Teguran

Indikator pemberitahuan surat teguran diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.28
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Surat Teguran

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
42	Tanggapan mengenai surat teguran	F	2	33	8	11	0	188	270	69.6%
		%	3.70	61.11	14.81	20.37	0			
43	Tanggapan mengenai waktu yang diberikan	F	3	32	9	10	0	190	270	70.4%
		%	5.56	59.26	16.67	18.52	0			
Total Skor								378	540	70.0%

Sumber : Data primer yang telah di olah

Secara keseluruhan persentase skor penilaian responden untuk indikator Surat teguran sebesar 70%. Nilai ini berada pada interval baik. Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa surat teguran yang diberikan bagi wajib pajak telah mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak dinilai wajar oleh wajib pajak. Selanjutnya untuk tanggapan responden sebagian besar responden menyatakan tepat yaitu 61.11% responden, dan juga terhadap jangka waktu yang diberikan sebagian besar responden menyatakan sudah sesuai dan tepat yaitu 59.26% responden. Meskipun demikian, masih terdapat responden yang menyatakan kurang tepat yaitu 14.81 % responden dan yang tidak 20.37% responden, demikian pula dengan jangka waktu yang diberikan dinilai kurang yaitu 16.67% responden dan yang tidak 18.52% responden.

Fenomena menagihan pajak kemungkinan besar dikarenakan hal ini. Sebagai langkah aktif penagihan pajak, semakin surat teguran yang dikirimkan kurang mendapat respon yang baik, menyoroti informasi tunggakan pajak dalam surat teguran yang tidak akurat.

B. Surat Paksa

Indikator pemberitahuan surat paksa diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.29
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Surat Paksa

No Item	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
44	Tanggapan mengenai surat paksa yang dikirim	F	1	19	24	10	0	173	270	64.1%
		%	1.85	35.19	44.44	18.52	0			
45	Tanggapan mengenai jangka waktu yang diberikan	F	2	21	21	10	0	177	270	65.6%
		%	3.70	38.89	28.89	18.52	0			
Total Skor								350	540	64.8%

Sumber : Data primer yang telah di olah

Persentase skor total penilaian responden untuk indikator Surat Paksa sebesar 64.8%. Nilai ini berada pada interval cukup. Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa Surat Paksa yang diberikan bagi wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak dinilai wajar dan cukup oleh wajib pajak. Kemudian tanggapan responden mengenai surat paksa sudah tepat sebesar 35.19%. Terhadap jangka waktu yang diberikan dinyatakan sebagian besar responden sudah sesuai. Meskipun demikian masih terdapat respoden yang menyatakan kurang tepat sebesar 44.44% responden dan yang tidak tepat sebesar 18.52% responden. Demikian pula dengan jangka waktu yang diberikan masih terdapat yang menyatakan kurang yaitu 28.89% responden dan yang tidak 18.52% responden.

Fenomena penagihan pajak kemungkinan besar dikarenakan hal ini. Semakin rendahnya tanggapan positif mengenai langkah aktif penagihan terhadap wajib pajak, menyoroti informasi tunggakan pajak dalam surat teguran yang tidak akurat.

Secara keseluruhan untuk penilaian terhadap variabel penagihan pajak yang diteliti dapat diperoleh dari jumlah penilaian terhadap 2 dimensi yang digunakan. Hasil akumulasi skor indikator variabel Penagihan Pajak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.30
Rekapitulasi Tanggapan Responden
Variabel Penagihan Pajak

No	Dimensi	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Penagihan Pasif	Surat Tagihan Pajak	375	540	69.4%	Baik
2		SKPKB	341	540	63.1%	Cukup Baik
3		SKPKBT	373	540	69.1%	Baik
4	Penagihan Pasif	Surat Teguran	378	540	70.0%	Baik
5		Surat paksa	350	540	64.8%	Cukup Baik
Total Dimensi			1817	2700	67.3%	Cukup Baik

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Hasil persentase skor aktual dari penagihan pajak diperoleh sebesar 67,3%. Nilai yang diperoleh masuk dalam kategori cukup baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees secara umum sudah dapat dikatakan cukup. Selanjutnya berdasarkan indikator dalam tabel 4.30 tampak indikator SKPKB memperoleh persentase paling sedikit dengan hanya sebesar 63.1% dan surat paksa sebesar 64.8% sementara yang lainnya sudah dapat dikatakan baik.

Data ini sesuai dengan fenomena yang terjadi korupsi yang terjadi atas SKPKB dengan modus memenangkan wajib pajak atas keberatan yang diajukannya juga menjadi kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan penagihan pajak (Ahmad Sobari, 2011). Selain itu Mohammad Ibrahim Adib (2012) menilai

bahwa upaya penagihan pajak dengan surat paksa paksa tidak akan berjalan efektif, karena data yang menjadi dasar penagihan pajak tidak akurat.

4.4 Analisis Verifikatif

4.4.1 Keterkaitan Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya Terhadap Penagihan Pajak

Semakin baik kualitas pelaporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan pemeriksaan pajak sehingga penagihan pajak wajib pajak badan diharapkan juga akan semakin meningkat. Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan dan hipotesis yang dikemukakan, maka untuk mengetahui pengaruh antara variable kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap penagihan pajak pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees digunakan analisis jalur (*path analysis*). Data penelitian diperoleh melalui penyebaran angket dengan jumlah sampel sebanyak 54 responden.

Hasil Korelasi Antar Variabel

Karena keterbatasan skala pengukuran data variabel penelitian (skala ordinal), maka sebelum menguji pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap penagihan pajak, terlebih dahulu data ordinal dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval*.

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen.

Dari data yang telah dinaikkan skala pengukurannya menjadi skala ukur interval dan dihitung total skor untuk setiap X (Kualitas Pelaporan Keuangan), Y (Pemeriksaan pajak), Z (Penagihan Pajak) selanjutnya diperoleh nilai korelasi antar variabel dengan korelasi Pearson (*Product Momment*). Nilai koefisien korelasi menunjukkan keeratan hubungan antar variabel yang diteliti. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan *SPSS 18 For Windows*, didapat koefisien korelasi variabel X (Kualitas Pelaporan Keuangan), Y (Pemeriksaan pajak), Z (Penagihan Pajak) sebagai berikut:

Tabel 4.31
Korelasi Antara Variabel
Correlations[a]

		Kualitas Pelaporan Keuangan (X)	Pemeriksaan Pajak (Y)	Penagihan Pajak (Z)
Kualitas Pelaporan Keuangan (X)	Pearson Correlation	1	.801**	.711**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
Pemeriksaan Pajak (Y)	Pearson Correlation	.801**	1	.824**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
Penagihan Pajak (Z)	Pearson Correlation	.711**	.824**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
a. Listwise N=54

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Koefisien korelasi antara kualitas pelaporan keuangan dengan pemeriksaan pajak sebesar 0,801, ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelaporan keuangan (X) dengan pemeriksaan pajak (Y). Jika diinterpretasikan

kuatnya korelasi kualitas pelaporan keuangan dengan pemeriksaan pajak adalah erat karena berkisar antara 0,80–1, dan arahnya positif ini berarti apabila kualitas pelaporan keuangan meningkat maka efektifitas pemeriksaan pajak akan semakin tinggi.

Koefisien korelasi antara pemeriksaan pajak (Y) dengan penagihan pajak (Z) sebesar 0,824, ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara Pemeriksaan pajak (Y) dengan Penagihan Pajak (Z). Jika diinterpretasikan kuatnya korelasi pemeriksaan pajak (Y) dengan penagihan pajak (Z) adalah erat karena berkisar antara 0,80– 1, dan arahnya positif ini berarti apabila efektifitas pemeriksaan pajak meningkat maka kualitas penagihan pajak akan semakin tinggi.

A. Pengujian Jalur Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Pemeriksaan Pajak

Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak dalam penelitian ini variabel kualitas pelaporan keuangan sebagai variabel sebab (eksogenus variabel) dan pemeriksaan pajak sebagai variabel akibat (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Menghitung Koefisien Jalur

Karena variable independen hanya satu variable (kualitas pelaporan keuangan), maka nilai koefisien jalur diperoleh berdasarkan hasil korelasi antar

variabel. Dari hasil perhitungan mengunakan SPSS diperoleh koefisien jalur kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak sebagai berikut:

Tabel 4.32
Hasil Koefisien Jalur X terhadap Y
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.838	4.470		-.411	.683
	Kualitas Pelaporan Keuangan (X)	.805	.084	.801	9.642	.000

a. Dependent Variable: Pemeriksaan Pajak (Y)
Sumber : Data primer yang telaj diolah,2012

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0.801 pada tabel 4.32 yang diperoleh dari koefisien jalur dari kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak (P_{YX}) Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variable kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh langsung kualitas pelaporan keuangan adalah senilai 0.801 terhadap pemeriksaan pajak. Sehingga dengan cukupnya kualitas pelaporan keuangan yang dilakukan wajib pajak badan menjadikan cukup juga pemeriksaan pajak yang dilakukan.

2) Menghitung Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 18.0for windows* diperoleh koefisien determinasi untuk besar pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak diperoleh pada tabel 4.33 pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak dari hasil perhitungan diperoleh sebesar 0,641.

Tabel 4.33
Hasil Koefisien Determinasi (pengaruh) X terhadap Y
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.801[a]	.641	.634	5.46161

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelaporan Keuangan (X)
Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Nilai koefisien determinasi diinterpretasikan sebagai besar kontribusi variable independen terhadap variable dependen. Jadi dari hasil penelitian ini dketahui bahwa kualitas pelaporan keuangan memberikan pengaruh 64.1% terhadap pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung, artinya jika kualitas pelaporan keuangan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees cukup baik dalam pelaksanaannya maka akan membuat cakupan pelaporan keuangan yang diperiksa dalam pemeriksaan pajak cukup sempit. Sesuai dengan teori bahwa semakin baik atau semakin berkualitas pembukuan atau pelaporan keuangan seorang wajib pajak maka semakin lancar dan efektif pekerjaan pemeriksa (Early Suandi, 2008:94). Dan sisanya 35.9% dipengaruhi oleh factor-faktor lain diluar kualitas pelaporan keuangan (residu). Faktor-faktor lain diluar kualitas pelaporan keuangan seperti tax evasion dan audit laporan keuangan diungkapkan (Jarunee Wonglimpiyarat, 2012). Jika di interprestasikan kedalam koefisien jalur untuk faktor lain yang tidak masuk dalam spesifikasi adalah sebagai berikut :

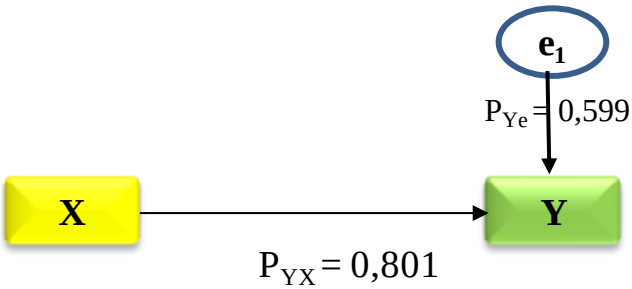
$$P_{Y\varepsilon} = \sqrt{1 - 0{,}641} = 0{,}599$$

$$= P_{YX} . P_{YX} = 0{,}801 \times 0{,}801 = 0{,}641(64{,}1\%)$$

Persamaan koefisien jalur yang terbentuk dalam menjelasakan pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Pemeriksaan pajak dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = 0{,}801\ X + 0{,}599$$

Model struktural pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.1
Model Struktural
Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Pemeriksaan Pajak

B. Pengujian Jalur Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya Terhadap Penagihan Pajak

Analisis regresi dengan variabel intervening dilakukan untuk melihat pengaruh langsung ataupun tidak langsung variabel kualitas pelaporan keuangan terhadap penagihan pajak.

Pengaruh tidak langsung dimaksudkan untuk menguji pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap penagihan pajak karena adanya variabel pemeriksaan pajak sebagai variabel intervening. Tujuannya untuk menguji keberadaan variabel intervening.

Selanjutnya untuk menguji pengaruh tidak langsung kualitas pelaporan keuangan terhadap penagihan pajak melalui pemeriksaan pajak ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Koefisien Jalur

variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (X) dan Pemeriksaan pajak (Y) sebagai variabel sebab (*exogenus variable*) dan variabel Penagihan Pajak (Z) sebagai variabel akibat (*endogenus variable*). Maka nilai koefisien jalur diperoleh berdasarkan hasil korelasi antar variabel. Dari hasil perhitungan mengunakan SPSS diperoleh koefisien jalur sebagai berikut:

Tabel 4.34
Hasil Koefisien Jalur X, Y terhadap Z
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.324	2.544		.914	.365
	Kualitas Pelaporan Keuangan	.086	.079	.143	1.089	.281
	Pemeriksaan Pajak	.428	.079	.710	5.426	.000

a. Dependent Variable: Penagihan Pajak

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0.143 pada tabel 4.34 yang diperoleh dari koefisien jalur dari kualitas pelaporan keuangan terhadap penagihan pajak (P_{XZ}) Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variable kualitas pelaporan keuangan terhadap penagihan pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh langsung kualitas pelaporan keuangan adalah senilai 0.143 terhadap penagihan pajak. Sementara itu untuk *standardized coefficients* sebesar 0.710 adalah koefisien jalur dari pemeriksaan pajak terhadap penagihan pajak (P_{YZ}) Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel pemeriksaan pajak terhadap penagihan pajak

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh langsung pemeriksaan pajak adalah senilai 0.710 terhadap penagihan pajak.

Sedangkan untuk melihat pengaruh tidak langsung atau untuk menguji adanya mediasi atau pengujian variable intervening yang digunakan, yaitu pemeriksaan pajak (Y). Artinya kualitas pelaporan keuangan (variabel independen) melalui variabel pemeriksaan pajak (variabel intervening) mempengaruhi penagihan pajak (variabel dependen). Untuk melihat besarnya pengaruh tidak langsung atau pengujian variabel intervening dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil korelasi variabel kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak pada tabel 4.32 diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,801 dan besarnya t hitung pada jalur ini sebesar 9,642. t hitung > t tabel (2,007) dan dinyatakan signifikan. (Persamaan a)
2. Berdasarkan hasil korelasi variabel pemeriksaan pajak terhadap penagihan pajak pada tabel 4.36 diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,710 dan besarnya t hitung pada jalur ini sebesar 5,426. t hitung > t tabel (2,007) dan dinyatakan signifikan.(Persamaan b)
3. Berdasarkan hasil korelasi variabel kualitas pelaporan keuangan terhadap penagihan pajak pada tabel 4.36 diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,143 dan besarnya t hitung sebesar 1,089. t hitung < t tabel (2,007) dan dinyatakan tidak signifikan. (Persamaan c)

Syarat untuk menguji variabel intervening adalah ketiga jalur persamaan diatas harus lah signifikan, namun dijelaskan oleh Kenny et al.,1998 dalam Larsman., 2006, bahwa dengan koefisien persamaan a dan persamaan b yang signifikan sudah cukup untuk menunjukkan adanya mediasi, meskipun persamaan c tidak signifikan. Sehingga tahap esensial dalam pengujian variabel intervening adalah variabel kualitas pelaporan keuangan mempengaruhi pemeriksaan pajak dan pemeriksaan pajak mempengaruhi penagihan pajak meskipun kualitas pelaporan keuangan tidak mempengaruhi penagihan pajak. Artinya complete mediation terjadi antara kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap penagihan pajak.

Sementara itu untuk melihat pengaruh tidak langsung kualitas pelaporan keuangan terhadap penagihan pajak melalui perkalian Koefisien korelasi P_{XY} dan Koefisien korelasi P_{YZ}. Sehingga :

Pengaruh tidak langsung = 0,801 × 0,710

= 0,569

Berdasarkan perhitungan diatas nilai pengaruh langung (koefisien jalur) lebih kecil dibandingkan nilai pengaruh tidak langsung (0,143 < 0,569), maka hubungan sebenarnya terjadi adalah hubungan tidak langsung, atau pemeriksaan pajak adalah berperan sebagai variabel intervening.

2) Menghitung Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 18.0for windows* diperoleh koefisien determinasi untuk besar pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak diperoleh pada tabel 4.33 pengaruh kualitas

pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadao penagihan pajak dari hasil perhitungan diperoleh sebesar 0,641.

Tabel 4.35
Koefisien Determinasi Kualitas Pelaporan Keuangan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Penagihan Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.829[a]	.687	.674	3.10364

a. Predictors: (Constant), kualitas pelaporan keuangan,pemeriksaan pajak

Nilai koefisien determinasi diinterpretasikan sebagai besar kontribusi variable independen terhadap variable dependen. Jadi dari hasil penelitian ini dketahui bahwa kualitas pelaporan keuangan dan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh 67.4% terhadap penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung, artinya jika kualitas pelaporan keuangan dan pemeriksaan pajak wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees cukup baik dalam pelaksanaannya maka akan membuat cakupan pelaporan keuangan yang diperiksa dalam pemeriksaan pajak cukup sempit dengan demikian penagihan pajaknya pun akan cukup rendah. Sesuai dengan teori bahwa semakin baik atau semakin berkualitas pembukuan atau pelaporan keuangan seorang wajib pajak maka semakin lancar dan efektif pekerjaan pemeriksa (Early Suandi, 2008:94). Juga teori yang diungkapkan Anang Mury Kurniawan (2008) yang mengatakan bahwa dasar dari penagihan pajak adalah berasal dari hasil pemeriksaan pajak. Dan sisanya 32.6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar kualitas pelaporan keuangan dan pemeriksaan pajak (residu). Faktor-faktor lain

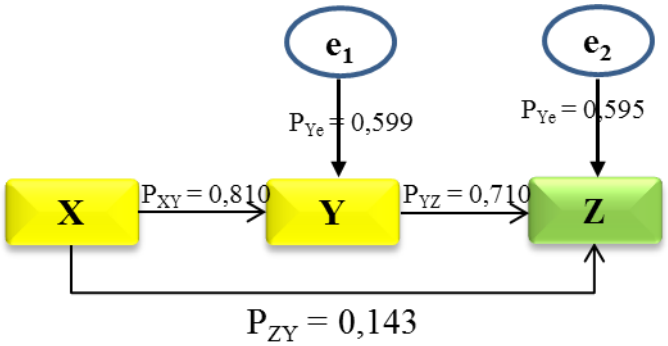
diluar kualitas pelaporan keuangan dan pemeriksaan pajak seperti tunggapan pajak diungkapkan oleh Riskon Ginting (2006). Jika di interprestasikan kedalam koefisien jalur untuk faktor lain yang tidak masuk dalam spesifikasi adalah sebagai berikut :

$$P_{xyz}=\sqrt{1-0{,}646}=0{,}595$$

Persamaan koefisien jalur yang terbentuk dalam menjelasakan pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap penagihan pajak dinyatakan sebagai berikut:

$$Y= 0{,}143\ X + 0{,}710\ Y + 0{,}595$$

Model struktural pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap penagihan pajakdapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.2
Model Struktural Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan, Pemeriksaan Pajak terhadap Penagihan Pajak

4.4.2 Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan dan Pemeriksaan Pajak Secara Parsial

Selanjutnya untuk membuktikan apakah kualitas pelaporan keuangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemeriksaan pajak pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, maka dilakukan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t. Hipotesis statistik yang diuji adalah sebagai berikut :

$H_0 : P_{YX} = 0$ Tidak terdapat pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Pemeriksaan pajak

$H_1 : P_{YX} \neq 0$ Terdapat pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Pemeriksaan pajak

Untu menguji hipotesis di atas digunakan uji t dengan formula sebagai berikut :

$$t_{\square} = \frac{P_{YX1}}{\sqrt{\frac{(1 - R^2XY)CRii}{(n-k-1)}}} = I$$

$$t = \frac{0.801}{\sqrt{\frac{(1-0.801)}{(54-2)}}} = 9.642$$

Jadi diperoleh nilai statistik uji t sebesar 9.642 sama dengan nilai t yang terdapat pada tabel 4.32 Kriteria pengujiannya adalah, "Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$", dimana dari tabel t dengan tingkat signifikansi (0.05) dan derajat bebas 52 diperoleh nilai t sebesar 2.007. Karena t_{hitung} (9,642) lebih besar dibanding t_{tabel} (2.007) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alas an yang kuat untuk menolak H_0 dan menerima hipotesis penelitian (H_a), sehingga dengan

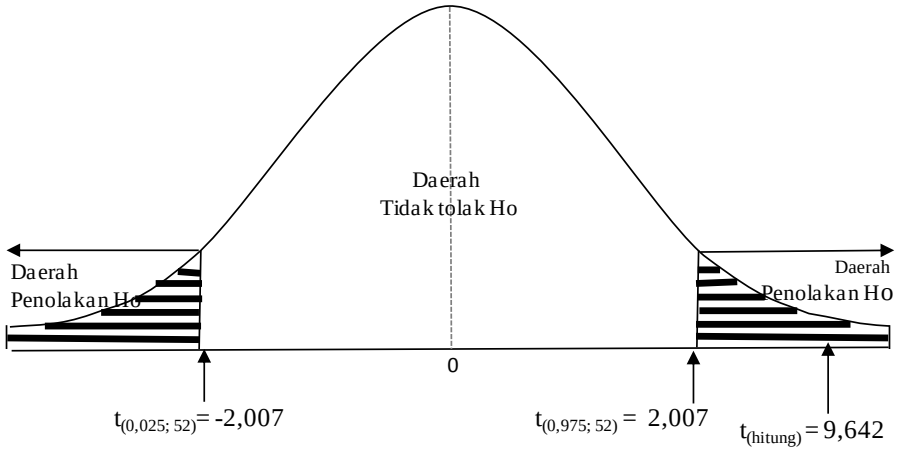
tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa kualitas pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pemeriksaan pajak pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung. Sesuai dengan teori yang telah disebutkan bahwa semakin baik atau semakin berkualitas pembukuan atau pelaporan keuangan seorang wajib pajak maka semakin lancar dan efektif pekerjaan pemeriksa (Early Suandi, 2008:94). Hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} untuk uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.36
Uji Hipotesis Pengaruh secara Parsial X terhadap Z

Hipotesis	Koefisien Jalur	t_{hitung}	t_{tabel}	Kesimpulan Statistik
Kualitas Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Pemeriksaan pajak	0,801	9,642	2,007	Signifikan (H_0 ditolak)

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis (hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}) pada pengujian parsial dapat digambarkan dalam diagram daerah penerimaan dan penolakan H_0 sebagai berikut :



Gambar 4.3
Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Pada Uji Parsial
Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Pemeriksaan Pajak

Pada gambar 4.3 dapat dilihat hasil uji menyatakan penolakan terhadap H_0 atau dengan kata lain menerima H_1. Jadi dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang bermakna (signifikan) dari kualitas pelaporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak. pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung.

4.4.3 Pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap Penagihan Pajak Secara Parsial

Selanjutnya untuk membuktikan apakah pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penagihan pajak pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, maka dilakukan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t. Hipotesis statistik yang diuji adalah sebagai berikut :

$H_0 : P_{ZY} = 0$ Tidak terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penagihan Pajak

$H_1 : P_{ZY} \neq 0$ Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penagihan Pajak

Untu menguji hipotesis di atas digunakan uji t dengan formula sebagai berikut :

$$t_{\square} = \frac{P_{ZY}}{\sqrt{\frac{(1 - R^2 ZY)}{(n - k - 1)}}}$$

$$t = \frac{0.824}{\sqrt{\frac{(1 - 0.679)}{(54 - 2)}}} = 10{,}497$$

Jadi diperoleh nilai statistik uji t sebesar 10,497 sama dengan nilai t yang terdapat pada tabel 4.34 Kriteria pengujiannya adalah, "Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$", dimana dari tabel t dengan tingkat signifikansi (0.05) dan

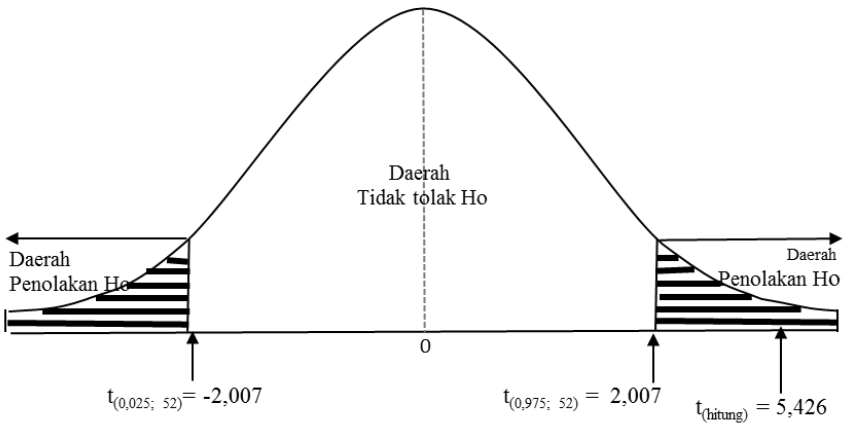
derajat bebas 52 diperoleh nilai t sebesar 2.007. Karena t_{hitung} (5,426) lebih kecil disbanding t_{tabel} (2,007) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alas an yang kuat untuk menolak H_0 dan menerima hipotesis penelitian (H_a), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penagihan pajak pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Sesuai dengan teori yaitu bahwa tujuan lain dari pemeriksaan pajak adalah untuk penagihan pajak *(delinquency audit*) (Anang Mury Kurniawan, 2011:19). Hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} untuk uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.37
Uji Hipotesis Pengaruh secara Parsial Y terhadap Z

Hipotesis	Koefisien Jalur	t_{hitung}	t_{tabel}	Kesimpulan Statistik
Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penagihan Pajak	0,710	5,426	2,007	Signifikan (H_0 ditolak)

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis (hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}) pada pengujian parsial dapat digambarkan dalam diagram daerah penerimaan dan penolakan H_0 sebagai berikut :



Gambar 4.4
Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Pada Uji Parsial Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penagihan Pajak

Pada gambar 4.4 dapat dilihat hasil uji menyatakan penolakan terhadap H_0 atau dengan kata lain menerima H_1. Jadi dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang bermakna (signifikan) dari Pemeriksaan Pajak terhadap Penagihan Pajak . pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.